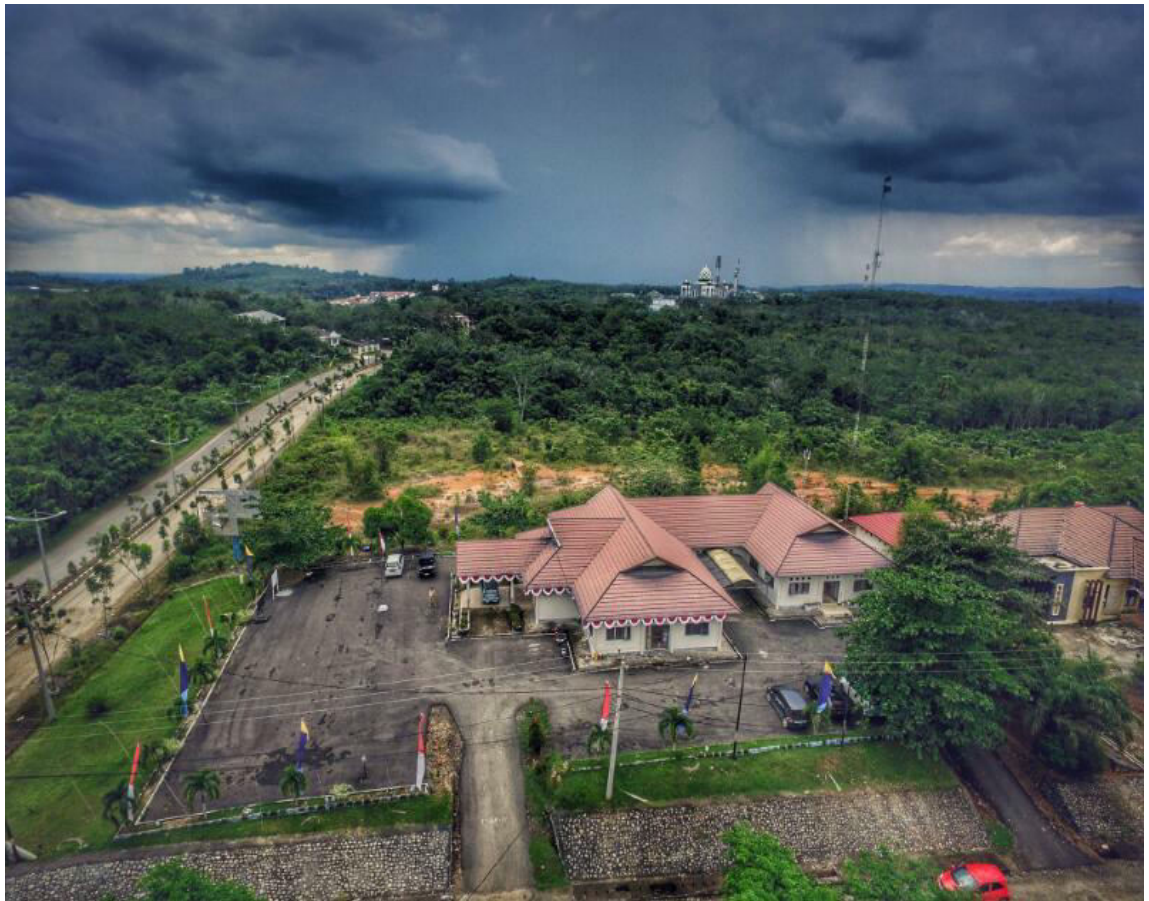


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2016-2021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT, atas Berkah dan Rahmat Nya Jua lah kami telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupaten balangan untuk Tahun Anggaran 2016-2021.

Renstra ini disusun mengacu pada RPJM Daerah, yang memuat Visi, Misi, tujuan, Sasaran, dan Nilai – Nilai Organisasi dan kegiatan yang ditetapkan lebih spesifik.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, DPRD Kabupaten Balangan, Sekda, Unsur Muspida, Kepala SKPD Pemkab Balangan atas masukan dan petunjuknya serta kerjasamanya dalam membangun Komunikasi dan Informasi di Bumi Sanggam ini.

Demikian Renstra ini di susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Paringin,

Kepala Dinas
Komunikasi dan informatika



Drs.H.Gunawan,M.Si
Nip. 19601223 198202 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN UMUM SKPD	3
A. Struktur Organisasi	3
B. Tugas Pokok, dan Fungsi	5
C. Kondisi internal	5
D. Capaian Kinerja Diskominfo periode sebelumnya	6
E. Analisis lingkungan Internal dan Eksternal	8
BAB III ISU – ISU STRATEGIS	10
A. Permasalahan	10
B. Isu strategis 5 (lima) Tahun mendatang	12
BAB IV VISI, MISI, NILAI – NILAI ORGANISASI TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	13
A. Visi dan Misi	13
B. Nilai – Nilai Organisasi	13
C. Tujuan dan Sasaran	14
D. Strategi dan Arah Kebijakan	15
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN, TARGET DAN PADU INDIKATIF	17
BAB VI PENUTUP	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Perangkat Daerah (Renstra SOPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SOPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SOPD dalam pembangunan daerah. Renstra SOPD, memuat *tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat *indikatif*.. Dengan demikian Renstra SOPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SOPD. Rencana Strategis SOPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SOPD (Renja SOPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SOPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sebagai salah satu SOPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi dan informatika dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2016 – 2021 yaitu

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BALANGAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA”

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang erwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;
7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 - 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
 - 13) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008

- 14) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;a
- 15) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 17) Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

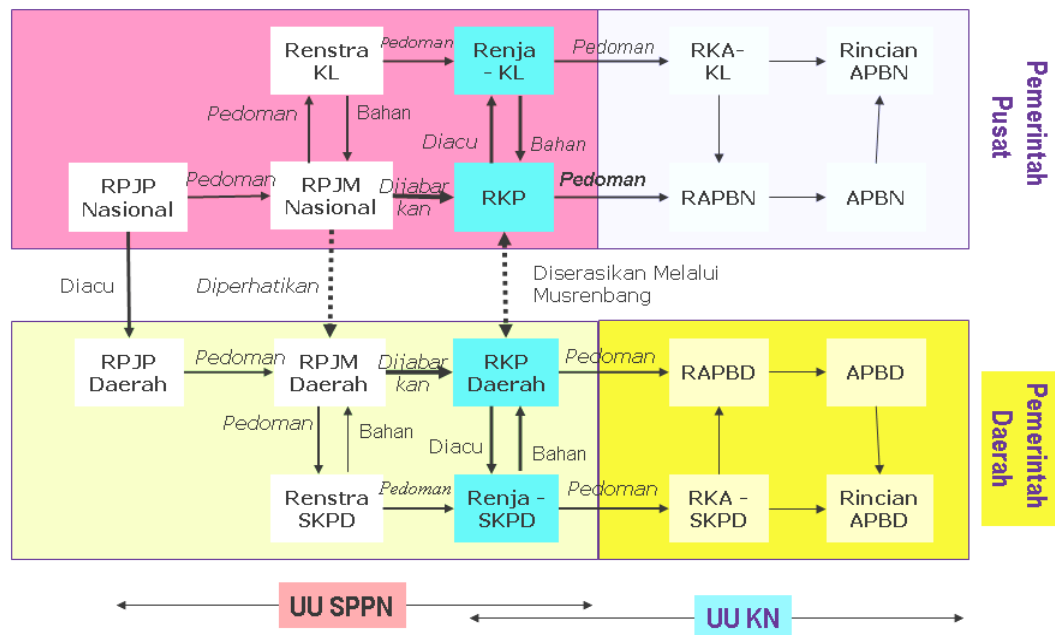
Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD dan diselaraskan dengan RPJMN 2015-2019. RPJMD menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SOPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD. Selanjutnya, untuk setiap tahun selama periode perencanaan,RPJMD akan dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan. RKPD tersebut selanjutnya menjadi acuan bagi SOPD untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja) SOPD. Renja SOPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SOPD.

Berkaitan dengan sistem keuangan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005, maka penjabaran RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Balangan untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan APBD Kabupaten Balangan.

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.1.

Alur Perencanaan dan Penganggaran



Gambar 1.1. Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang dan sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan telah tersedianya acuan resmi maka akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan

segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 adalah untuk:

1. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2016-2021 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika periode lima tahun ke depan.
2. Menjabarkan program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);

- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;

1.5 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

(Latar belakang penyusunan Renstra SOPD, pengertian Renstra SOPD dan proses penyusunan Renstra SOPD)

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

(Undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya)

1.3. Hubungan Antar Dokumen

(Hubungan antara RPJMN, RPJMD, RKPD, Rennstra dan RKA)

1.4. Maksud dan Tujuan

(Menjelaskan maksud serta tujuan penyusunan Renstra SOPD, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SOPD)

1.5. Sistematika Penulisan

(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SOPD ini)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SOPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui renstra sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SOPD dan mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Memuat tentang dasar hukum pembentukan SOPD, Struktur organisasi serta uraian tugas pokok dan fungsi

2.2 Sumber Daya Dinas

Memuat penjelasan tentang sumber daya yang dimiliki SOPD

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SOPD berdasarkan target Renstra SOPD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan dan pelayanan SOPD

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SOPD dalam periode 5 tahun.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Lingkungan Hidup
Strategis

3.4 Penentuan Isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SOPD dengan berpedoman pada tujuan, sasaran strategi dan kebijakan RPJMD

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pendanaan Indikatif

Menjelaskan Rencana program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu dengan berpedoman pada program, kegiatan, indikator kinerja pada RPJMD.
- b. Program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SOPD serta disesuaikan dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.

- c. Program, Kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- d. Penentuan lokasi kegiatan dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang yang ditetapkan
- e. Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah.

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Menjelaskan ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan SOPD dalam mengimplementasikan Renstra.

BAB VII Penutup

- Lampiran

BAB II

GAMBARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan Perbup Nomor

38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

a. **Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi**

1. Tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dimana disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan komunikasi dan informatika berdasarkan asas otonomi

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, persandian untuk pengamanan informasi, dan statistik sektoral;
- d. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan kesekretariatan.

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan didukung dengan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan , terdiri dari

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Statistik Sektoral terdiri dari :

- a. Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur;
- b. Pengelolaan Data Statistik Ekonomi;
- c. Pengelolaan Data Statistik Sosial Budaya.

4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik;
- b. Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi;
- c. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik.

5. Bidang Pengembangan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik;
- b. Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- c. Seksi Pengelolaan Komunikasi.

5. Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government terdiri dari :

- a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
- b. Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas;
- c. Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.

6. Bidang Layanan e-Government terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kelola e-Government;
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi Publik;
- c. Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan. dan

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas yang dibebankan kepada unsur organisasi adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang Komunikasi dan Informatika memimpin, mengkoordinasikan seluruh kegiatan dinas;

- b) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam melaksanakan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan dinas, serta melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan program serta kegiatan dinas;
- e) Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi dinas dibidang pembinaan kelembagaan usaha pos dan telekomunikasi, usaha sarana komunikasi, dan diseminasi informasi;

Tata Laksana Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Prinsip Tata Laksana

Tata laksana Dinas Komunikasi dan Informatika mengacu pada delapan karakter dasar dalam mewujudkan tata laksana pemerintahan yang baik, yaitu :

- a) Partisipasi Aktif dalam merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, membina dan melaksanakan tugas dinas dalam rangka menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
- b) Penegakan hukum, memberi sanksi bagi yang melanggar hukum;
- c) Transparansi, terbuka informasi bagi yang memerlukan kecuali yang sifatnya rahasia negara;
- d) Responsif dalam menjawab tuntutan untuk perbaikan;
- e) Berorientasi pada musyawarah untuk mufakat dalam merencanakan kegiatan, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul;
- f) Keadilan dan perlakuan yang sama untuk semua orang dalam melayani;

- g) Efektif dan ekonomis dalam mengelola sumber daya;
- h) Akuntabilitas. Melaksanakan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pada target target yang ditetapkan.

2. Tata Kerja

- a) Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah;
- b) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkup dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang undangan yang berlaku;
- c) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas;
- d) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta menjabarkannya dalam program dan kegiatan operasional sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu waktu;
- e) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan masing masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan;

- f) Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala Dinas dapat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

3. Prosedur Kerja Dinas :

Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati untuk menyelenggarakan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi dan Informatika.

Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan pengelolaan, administrasi umum, pengelolaan administrasi kepegawaian, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan lingkup perbendaharaan, penyusunan pengelolaan administrasi keuangan, system akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, penyiapan bahan pembinaan pembendaharaan, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan bertanggung jawab kepada sekretaris untuk penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan program, penyusunan bahan pembinaan sistem informasi manajemen, penyusunan rencana strategis, dan pengumpulan bahan pengusulan program, bahan pembinaan sistem pengelolaan informasi, bahan pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan pelaksana kegiatan lingkup penyusunan rencana dan program dinas.

Bidang Statistik Sektoral

Kepala Statistik Sektoral bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Statistik Sektoral meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum Statistik Sektoral , potensi dan permasalahan Statistik Sektoral , kebijakan teknis Statistik Sektoral , rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, pembinaan teknis operasional, pelayanan umum informasi Statistik Sektoral , evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan Pengelolaan Data Statistik Infrastruktur, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi bidang Statistik Sektoral, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Pengelolaan Data Statistik Ekonomi

Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Ekonomi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Pengelolaan Data Statistik Ekonomi meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Data Statistik Ekonomi, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi bidang Statistik Sektoral , melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Seksi Pengelolaan Data Statistik Sosial Budaya

Kepala Seksi Angkutan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Pengelolaan Data Statistik Sosial Budaya, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan Data Statistik Sosial Budaya, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi Data Statistik Sosial Budaya, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, potensi dan permasalahan prasarana dan sarana, kebijakan teknis Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, pelayanan umum informasi bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik

Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan Pengelolaan Aspirasi Publik, meliputi : penyusunan rencana kegiatan, penyiapan bahan kebijakan umum Pengelolaan Aspirasi Publik, penyiapan bahan teknis operasional, penyiapan bahan pembinaan teknis, penyiapan bahan laporan dan evaluasi seksi Pengelolaan Aspirasi Publik, melakukan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup seksi

Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi

Kepala Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Seksi Produksi dan Reproduksi Informasi, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan

kebijakan umum bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, , evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik

Kepala Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang, Pengelolaan Informasi dan Saluran Komunikasi Publik, , evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Pengembangan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengembangan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan Pengembangan Komunikasi Publik, potensi dan permasalahan Pengembangan Komunikasi Publik, kebijakan teknis Pengembangan Komunikasi Publik, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Komunikasi Publik, pelayanan umum informasi

bidang Pengembangan Komunikasi Publik, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Kemitraan Komunikasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Kemitraan Komunikasi Publik, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kemitraan Komunikasi Publik , evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pelayanan Informasi Publik

Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pelayanan Informasi Publik, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pelayanan Informasi Publik, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengelolaan Komunikasi

Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum

bidang Pengelolaan Komunikasi, menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Komunikasi, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government

Kepala Bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Pengelolaan Infrastruktur e-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government, potensi dan permasalahan Pengelolaan Infrastruktur e-Government, kebijakan teknis Pengelolaan Infrastruktur e-Government, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government, pelayanan umum informasi bidang Pengelolaan Infrastruktur e-Government, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Infrastruktur dan Teknologi, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Infrastruktur dan Teknologi menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Infrastruktur dan Teknologi evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas

Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Interoperabilitas bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk pelaksanaan dan Pengelolaan Data dan Interoperabilitas, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengelolaan Data dan Interoperabilitas menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengelolaan Data dan Interoperabilitas evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Keamanan Informasi dan Persandian

Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Keamanan Informasi dan Persandian, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Keamanan Informasi dan Persandian menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang, kebijakan teknis komunikasi dan informatika, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keamanan Informasi dan Persandian evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Bidang Layanan e-Government

Kepala Bidang Layanan e-Government bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan Layanan e-Government, meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum

bidang Layanan e-Government, potensi dan permasalahan Layanan e-Government, kebijakan teknis Layanan e-Government, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Layanan e-Government, pelayanan umum informasi bidang Layanan e-Government, evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Tata Kelola e-Government

Kepala Seksi Tata Kelola e-Government bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Tata Kelola e-Government meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Tata Kelola e-Government menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang Tata Kelola e-Government, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Keamanan Informasi dan Persandian evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengembangan Aplikasi Publik

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Publik bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Pengembangan Aplikasi Publik meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengembangan Aplikasi Publik menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang Pengembangan Aplikasi Publik, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Aplikasi Publik evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Pemerintahan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang untuk Pengembangan Aplikasi Pemerintahan meliputi : penyusunan program dan kegiatan bidang, penyiapan bahan kebijakan umum bidang Pengembangan Aplikasi Pemerintahan menyusun potensi dan permasalahan lingkup bidang Pengembangan Aplikasi Pemerintahan, rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengembangan Aplikasi Pemerintahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang.

Kelompok Jabatan Fungsional

Koordinator tenaga fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional, yaitu pengujian kendaraan bermotor.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor : 28 Tahun 2014 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan. Selanjutnya diagram Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan pada akhir tahun 2017 adalah sebanyak 32 orang yang terdiri dari tenaga kerja harian lepas sebanyak 11 orang dan Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang yang terdiri dari berbagai tingkat pendidikan dan jabatan eselonering sesuai dengan komposisi jabatan dan tanggung jawab masing masing pegawai yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

SOPD	JLH (ORG)	KUALIFIKA SI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGK AT	JLH (ORG)	GOL.	JLH (ORG)
Dinas Kominf o	33	SD	-	-	-	-	-
		SLTP	-	-	-	-	-
		SLTA	1	II/c	-	II	1 Orang
		D1	-	-	-	-	-
		D2	-	-	-	-	-
		D3	3	III/d	-	III	3 Orang
		D4	-	-	-	-	-

		S1	4	III/c	4	III	4 Orang
		S1	2	III/a	2	III	2 Orang
		S1	2	IV/a	4	III	2 Orang
		S1	4	III/d	4	III	4 Orang
		S1	1	III/b	1	III	1 Orang
		S1	1	II/d	1	II	1 Orang
		S2	1	IV/ c	1	IV	1 Orang
		S2	1	III/ d	1	III	1 Orang
		S2	1	III/ b	1	III	1 Orang

Personil PNS Dinas Komunikasi dan Informatika yang berjumlah 32 orang dengan jenjang pendidikan dan jenjang kepangkatannya masing masing

sebagaimana digambarkan sebelumnya adalah sumberdaya yang memiliki nilai strategis bagi Institusi di Kabupaten Balangan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa formasi jabatan struktural Dinas Kominfo Kabupaten Balangan tidak semua terisi hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja.

Sedangkan untuk tenaga kerja harian lepas sebanyak 11 (Sebelas) orang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Surat Keputusan yang telah ditetapkan diantaranya:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| 1. Tenaga Kebersihan sebanyak | : 2 orang |
| 2. Penjaga Malam sebanyak | : 2 orang |

3. Tenaga Administrasi Penyusunan

- | | |
|--|-----------|
| 3. Laporan Keuangan sebanyak | : 2 orang |
| 4. Tenaga Pengarsipan | : 1 orang |
| 5. Tenaga Penyusun laporan perencanaan
sebanyak | : 1 orang |
| 6. Tenaga Administrasi Bidang | : 3 orang |

Jumlah	: 11 orang
--------	------------

Sedangkan sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan. Adapun sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Komunikasi dan

InformatikaKabupaten Balangan sebagai pendukung pelaksanaan tugas sebagai berikut :

1. Kendaraan

Sampai saat ini kendaraan bermotor dinas yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Balangan adalah sebanyak 17 buah yang terdiri dari

Mobil Dinas	: 3 buah
Station wagon	: 1 buah
Sepeda Motor Dinas	: 10 buah

2. Komputer, Handycam, LCD dan Kamera

Komputer yang ada dan menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan adalah 7 buah laptop. Disamping komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan juga memiliki 1 buah handycam, 2 buah LCD dan 4 buah kamera digital.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas

2.3.1 Capaian Kinerja Yang Telah Dihasilkan Melalui Pelaksanaan Renstra 2011 – 2015

Terdapat delapan indikator kinerja sesuai dengan SPM, tugas dan fungsi dinas yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan dalam table 2.2. Dari table tersebut tampak bahwa pencapaian target masih dibawah SPM.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang berkaitan dengan tingkat kinerja pelayanan terhadap masyarakat dengan memberikan jasa pelayanan di bidang Pendapatan Daerah, menuntut Pemerintah Daerah melakukan optimalisasi penggalan potensi pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor retribusi jasa umum, retribusi perijinan tertentu dan lain-lain pendapatan asli daerah yang

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kominfo

A. Lingkungan Internal

Faktor lingkungan internal di dalam analisis ini ada 2 (dua) faktor yaitu faktor kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses). Hasil pengamatan terhadap faktor internal adalah sebagai berikut :

A.1 Kekuatan (Strengths)

a. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dibentuk oleh Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

b. Jumlah Sumber Daya Manusia

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru didirikan tentunya masih melakukan persiapan salah satunya menyusun Standar Operasional Prosedur dan menetapkan kinerja setiap tahunnya. Diharapkan dengan persiapan yang mapan akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tupoksi dan membantu dalam progres pembangunan di Kabupaten Balangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sampai dengan akhir tahun 2016, mempunyai jumlah pegawai sebanyak 32 orang yang dilatar belakangi berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1);

c. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan merupakan faktor yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperlancar kegiatan operasional dan kegiatan-kegiatan lainnya.

d. Terisinya seluruh jabatan Eselon III serta adanya TUPOKSI masing-masing bidang dan seksi sebagai acuan pelaksanaan tugas.

a. Adanya dukungan APBD Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan kegiatan.

A.2 Kelemahan

a. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai)

Kemampuan SDM dan keterampilan pegawai pada Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dimasing-masing bidang masih belum merata sebagaimana yang diharapkan, hal ini dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis.

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik.

Koordinasi dan Sinkronisasi pada masing-masing bidang belum berjalan dengan baik, sehingga dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

- b. Belum Tertatanya Sistem Informasi yang baik.

Informasi pengolahan data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan belum tertata melalui sistem informasi yang baik.

B. Lingkungan Eksternal

B.1 Peluang dan Tantangan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas untuk lima tahun ke depan berdasarkan hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan, antara lain dari perwujudan sistem kota di wilayah Kabupaten Balangan yang memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi pengembangan pelayanan kominfo yaitu

Terkait pembangunan bidang di Kabupaten Balangan, dapat dilihat pada aspek aspek sebagai berikut

a. Tantangan

- Sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dilihat dari komposisi golongan dan pangkat jabatan telah memadai, namun terdapat Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yang masih kosong. Selain itu jika dilihat dari komposisi latarbelakang pendidikan serta jumlah baik pada staf maupun fungsional tertentu belum memadai.
- Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru didirikan tentunya masih melakukan persiapan salah satunya menyusun Standar Operasional Prosedur dan menetapkan kinerja setiap tahunnya. Diharapkan dengan persiapan yang mapan akan bisa memberikan pelayanan yang terbaik sesuai tupoksi dan membantu dalam progres pembangunan di Kabupaten Balangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- Kurangnya pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jangkauan penggunaan teknologi informasi.
- Kurang terpenuhinya Kebutuhan informasi di era keterbukaan informasi publik.

b. Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika

- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.
- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan elektronik government pada Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Aktivitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan berfokus pada perwujudan kondisi Layanan Egoovernment dan infrastruktur komunikasi dan informatika yang handal dalam rangka menunjang kemajuan dan pertumbuhan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah aspek-aspek pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan :

1. Pelayanan PPID
2. Pelayanan Informasi dan aduan Publik
3. Layanan E-Government

Tiga aspek pelayanan di atas merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dalam rangka perwujudan visi dan misi Kepala Daerah. Secara umum, keenam aspek pelayanan tersebut dapat terealisasi sesuai dengan target dan ketentuannya, dengan berbagai identifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pelayanan PPID

Permasalahan inti pada Pelayanan PPID diantaranya adalah

1. Belum tersedianya system Informasi PPDI
2. Belum Tersedianya Sarana dan Prasarana yg memadai.

2. Layanan E-Government

Sampai dengan akhir tahun 2016 DISKOMINFO melakukan pengelolaan website Pemerintah Kabupaten Balangan. Sampai dengan akhir tahun anggaran renstra, belum seluruh OPD terakses dalam website Pemkab. Adapun targetnya adalah bahwa aksesibilitas seluruh OPD bahkan sampai tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

3. Pelayanan Informasi dan aduan Publik.

Permasalahannya belum adanya SOP Tentang penanganan dan layanan Aspirasi dan aduan Publik. Yang berdampak pada proses tindak lanjutnya.

1.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

Visi :

“ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia “

Makna dari Visi tersebut sebagai berikut:

MAJU:

Kabupaten Balangan harus mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain yang sudah lebih dahulu maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. **Balangan yang maju** juga berarti roda pemerintahan sudah berjalan secara optimal yang didukung oleh struktur kelembagaan pemerintah daerah

yang lengkap dan diisi serta dikelola oleh aparatur yang berkompeten di bidang tugasnya masing-masing, sehingga mampu memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat. Kemajuan juga tercermin pada tingkat partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pembangunan

SEJAHTERA:

Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing daerah, kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang meliputi: sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, kesempatan berusaha, rasa aman, didukung oleh infrastruktur yang mantap.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dan kesehatan;
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan;
4. Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam (potensi daerah) berdasarkan kearifan lokal yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan sosial budaya kemasyarakatan;
6. Optimalisasi pemberdayaan aparatur pemerintah daerah;

7. Mewujudkan kamtibmas dan kepastian hukum untuk terciptanya suasana yang kondusif.

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2016-2021, maka Dinas Kominfo akan mendukung pelaksanaan misi mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan budaya sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan.

Tabel. 3.2.1

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kominfo
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

Visi :				
“ Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia “				
No	KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

	Misi : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan			
	Program :			
1	FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Masih Kurangnya SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Masih Kurangnya SDM di Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan SDM di Bidang Komunikasi dan informatika
2	KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Masih Kurang Informasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Masih Kurang Informasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatkan Informasi Pembangunan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
3	PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Belum maksimalnya Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan	Belum maksimalnya Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan	Meningkatkan Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi

		Informasi	Informasi	
4	FASILITASI BIDANG INFRASTRUKTUR TIK	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Masih kurangnya peralatan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan	Meningkatkan penyediaan Peralatan Infrastruktur dan Jaringan Internet diwilayah Kabupaten Balangan
5	PENGEMBANGAN LAYANAN E-GOVERNMENT	Masih kurangnya Layanan E-Government yang berbasis IT	Masih kurangnya Layanan E-Government yang berbasis IT	Meningkatkan Layanan E-Government yang berbasis IT

1.3 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” atau kesenjangan harapan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan

kondisi riil saat perencanaan dibuat. Capaian kinerja pembangunan di berbagai bidang pada masa sebelumnya telah menghantarkan masyarakat Kabupaten Balangan ke dalam kondisi kehidupan yang semakin baik. Berbagai permasalahan pokok yang muncul pada awal periode pemerintahan sebelumnya telah seoptimalnya diatasi. Hal ini terbukti pada hasil capaian kinerja pembangunan pada akhir periode pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan adanya perbaikan signifikan pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. Namun demikian, patut diakui bahwa pembangunan yang sudah dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat pada periode pemerintahan yang lalu masih menyisakan beberapa permasalahan pokok yang mendasar guna mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Balangan yang lebih baik lagi.

Penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 2011-2016, telah membuahkan hasil yang menggembirakan, tetapi tetap menyisakan tugas ke depan, yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan pokok yang mendasar di masa datang. Beberapa permasalahan pembangunan mendasar yang dapat diidentifikasi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Balangan, diantaranya adalah:

1. Pembinaan jasa usaha telekomunikasi dan diseminasi informasi belum terlaksana secara optimal, antara lain pembinaan terhadap kualitas informasi pada warnet.
2. Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur telekomunikasi, seperti media internet di desa dan kecamatan karena infrastruktur ini secara langsung

bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat khususnya dalam menunjang informasi pasar produksi wilayah.

3. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi di dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan berperan dalam ruang publik, dan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini tidak terlepas dari masalah penyediaan, pengelolaan, dan penyebarluasan informasi publik yang masih sampai saat ini masih mengalami berbagai kekurangan, akibat dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia bidang informasi dan komunikasi, belum memadainya regulasi di bidang komunikasi dan informasi, serta sarana dan prasarana komunikasinya.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, isu-isu strategis harus memenuhi kriteria memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah; merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;

kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Isu-isu strategis yang harus dikelola dengan baik dalam perjalanan masyarakat Balangan lima tahun mendatang, yaitu:

- 1) Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang mengacu nilai-nilai *good governance* dengan mengedepankan *clear governance* di semua aspek serta peningkatan kompetensi, daya kreasi dan inovasi aparatur pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan publik
- 2) Ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang kurang memadai dalam mendukung pengembangan wilayah. Belum terwujudnya sistem pusat simpul transportasi (terminal) yang mengikuti rencana struktur ruang wilayah masih menjadi kendala dalam menata trayek angkutan yang menghubungkan antar wilayah. Meningkatnya kebutuhan masyarakat pada fasilitas dan pelayanan publik membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah
- 3) Perkembangan penduduk dengan kebutuhannya pada sarana dan prasarana serta semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut adanya data base yang lebih valid dan akurat.
- 4) Peningkatan aktivitas masyarakat memerlukan akses Internet yang memudahkan dalam melihat Informasi terutama pada daerah pelosok.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab IV dikemukakan rumusan pernyataan , tujuan dan sasaran jangka menengah serta tujuan strategik dan kebijakan yang ingin dicapai Dinas, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan,

4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

4.1.1 Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Guna memadukan, mengarahkan menggerakkan serta memberikan kekuatan, semangat dan komitmen dalam menjalankan roda organisasi maka perlu ditetapkan suatu Visi. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang.

Penetapan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan tentunya mengacu kepada apa yang dicita-citakan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

“Mewujudkan Diskominfo Sebagai Pusat Komunikasi dan Informatika Daerah yang berbasis E-Goverment”

Untuk mewujudkan Visi Dinas, telah ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh organisasi/lembaga dalam usahanya mewujudkan Visi. Misi merupakan suatu bentuk yang nyata untuk dituju

serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Adapun Misi Dinas Komunikasi dan informatika Tahun 2016-2021, sebagai berikut :

2.1.1 1. 2 Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Setelah menentukan VISI yang menjadi dasar untuk mencapai tujuan yang diinginkan, Dinas Kominfo Kabupaten Balangan harus menyusun MISI atau mandat atau sesuatu yang harus di emban dan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo sebagai penjabaran dari VISI yang telah di tetapkan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Dengan melihat dan memperhatikan permasalahan umum dan Tugas Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Balangan serta Aspirasi dan masukan yang diterima, maka ditetapkanlah MISI Dinas Kominfo Kabupaten Balangan selama Lima Tahun ke depan (Tahun 2016-2021) sebagaimana berikut :

1. Menyediakan prasarana dan sarana komunikasi dan informatika yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan informasi dan telekomunikasi.
3. Meningkatkan kualitas SDM dalam bidang komunikasi dan informatika.
4. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dan media massa.
5. Meningkatkan Layanan E-Government

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Dari visi dan misi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan. . Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tersebut sebagaimana berikut :

4.1.1 Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Diterapkannya E-Government guna peningkatan kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat
2. Meningkatnya data statistik sektoral Kabupaten Balangan

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut

4.2 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan

Pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai disebut dengan strategi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana

Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut:

4.2.1 Strategi

A. Peningkatan Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika

Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika menuju terwujudnya sistem pelayanan secara elektronik sejalan dengan perubahan lingkungan strategis melalui Penataan penyelenggaraan diseminasi dan distribusi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui kegiatan pemutahiran e-government.

4.2.2 Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan 2016-2021, kebijakan umum yang ditempuh sebagai berikut:

A. Bidang Komunikasi dan Informatika.

Tabel 3.3.1

Arah Kebijakan Rencana Strategis 2015-2019

Kementerian Komunikasi dan Informasi

No	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik	Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;• Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan

			<p>penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas; • Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; • Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan
--	--	--	---

			<p>kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; • Kampanye publik terkait revolusi mental; • Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; • Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; • Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP); • Dewan Pers; dan I. Komisi Penyiaran
--	--	--	--

			Indonesia (KPI).
2.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah	Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; • Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan • Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
3.	Meningkatnya keterbukaan	Mempercepat pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi

	informasi publik dan komunikasi publik; meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.	kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan	kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasiinformasi. <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara
4.	Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan diberbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara

	keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan		tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air dan telekomunikasiinformasi. <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan dan kedaulatan telekomunikasi dan informasi di seluruh wilayah perbatasan negara
5.	meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akses publik terhadap informasi	1.Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public 2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan	<ul style="list-style-type: none"> • penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah. • penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan

	<p>kinerja instansi pemerintah; makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern; dan meningkatnya implementasi open government pada seluruh instansi pemerintah.</p>	<p>transparan, dan terintegrasi</p> <p>3. Penerapan open e-government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan</p>	<p>infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap publik negara; • peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran kedalam website masing-masing K/L/D; • penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan
--	--	--	---

			kebijakan publik; <ul style="list-style-type: none"> • pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; • diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan • penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.
6.	meningkatnya kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai	1. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien dan sinergis 2. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional	<ul style="list-style-type: none"> • penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); • penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan

	bidang	3.Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit	<p>kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; • penataan regulasi dan kebijakan di bidang apartur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
--	--------	---	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara
--	--	--	--

			(KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
7.		Peningkatan kualitas pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; • mendorong inovasi pelayanan publik; • peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan • penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
8.		1. Tersedianya layanan komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) menjadi pitalebar-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih

		<p>melalui, jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO;</p>	<p>berorientasi kepada ekosistem pitalebar (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola Dana USO;</p> <p>2. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas melalui:</p> <p>a. Penataan ulang alokasi spektrum frekuensi (spektrum refarming) dengan prinsip netralitas teknologi;</p> <p>b. Optimalisasi frekuensi dan jaringan infrastruktur wireless pada instansi Pemerintah dengan implementasi konsep Government Radio Network (GRN);</p> <p>c. Konsolidasi infrastruktur dan spektrum bagi penyelenggara jaringan</p>
--	--	---	---

			<p>bergerak seluler, FWA, dan BWA maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang berkeadilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan migrasi TV analog ke digital sesuai jadwal yang ditetapkan; e. Mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi digital dividend yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar;
9.		Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah; • Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian

			<p>bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi. • Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal
--	--	--	---

BAB V

Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif

Sebagai penjabaran dari kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, maka ditetapkanlah rencana Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya. Pembentukan program dan kegiatan didasarkan analisa kebutuhan dan dinamisasi pembangunan bidang Kominfo dengan mengacu kepada visi dan misi Kepala Daerah, serta tujuan sasaran dan strategi. Berikut ini rincian program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021.

SEKRETARIAT

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan indikator kinerja Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat setiap tahun.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik setiap tahun.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan indikator kinerja Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional setiap tahun.

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan indikator kinerja tersedianya jasa kebersihan kantor setiap tahun.
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan indikator kinerja Tersedianya alat tulis kantor setiap tahun.
6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator kinerja Tersedianya barang cetakan dan penggandaan setiap tahun.
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja Tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor setiap tahun.
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indicator kinerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahun.
9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja Tersedianya peralatan rumah tangga setiap tahun.
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan indikator kinerja ersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan setiap tahun.
11. Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan indikator kinerja Tersedianya makanan dan minuman kantor setiap tahun.
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah, dengan indikator kinerja Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah setiap tahun.

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah, dengan indikator kinerja Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah setiap tahun.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Gedung Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Garasi yang dibangun.
2. Pengadaan mebeleur, dengan indikator kinerja Jumlah Meubeler yang diadakan;
3. Pengadaan Komputer, dengan indikator kinerja Jumlah Peralatan Komputer yang diadakan;
4. Pengadaan Alat-alat Studio, dengan indikator kinerja Jumlah Alat-alat studio yang diadakan;
5. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon, dengan indikator kinerja Jumlah Instalasi Listrik dan Telpon yang diadakan;
6. Pengadaan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan;
7. Penyediaan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan indikator kinerja Tersedianya kendaraan dinas/ oprasional.
8. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan indikator kinerja Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan;

9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, dengan indikator kinerja Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara;

10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, dengan indikator kinerja Terpeliharanya gedung kantor setiap tahun.

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, dengan indikator kinerja Tersedianya Pakaian Dinas Pegawai Beserta Perlengkapannya setiap tahun.

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu, dengan indikator kinerja Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu yang diadakan..

3. Pengadaan pakaian KORPRI, dengan indikator kinerja Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan.

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD, dengan indikator kinerja Tersusunnya laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD tiap tahun ;

2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dengan indikator kinerja Tersusunnya laporan Keuangan Semesteran setiap tahun

3. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun, dengan indikator kinerja Tersusunnya 1 dokumen laporan keuangan akhir tahun setiap tahun.

4. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan keg. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD.
5. Penyusunan RKA dan DPA SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen RKA dan DPA yang Terealisasi.

E. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan indikator kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal;
2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dengan indikator kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
4. Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa dengan indikator kinerja Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa;

BIDANG PENGEMBANGAN KOMUNIKASI PUBLIK

F. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Media Cetak, dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi kegiatan pembangunan kabupaten Balangan;

2. Jumpa Pers, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Jumpa Pers yang Terlaksana;
3. Kerjasama dengan media Online, dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi kegiatan pembangunan kabupaten Balangan pada Berita Online di Website;
4. Operasional Media Center, dengan indikator kinerja Terlaksananya Kegiatan Operasional Media Center;
5. Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat, dengan indikator kinerja Jumlah Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Balangan;
6. Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
7. Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan;
8. Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIP), dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan;
9. Monitoring dan evaluasi ,dengan indikator kinerja Jumlah Monitoring dan evaluasi bidang informatika;

BIDANG PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

G. Program Fasilitas Bidang Infrastruktur TIK;

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Teknologi Informasi, dengan indikator kinerja Jumlah Menara Hotspot dan CCTV yang dipelihara;
2. Pengawasan Dan Monitoring Pemancar Dan Frekuensi Radio, dengan indikator kinerja Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan dan penerimaan PAD dari retribusi menara;
3. Pengadaan Manajemen Bandwidth, dengan indikator kinerja Jumlah Jaringan koneksi internet ke Kecamatan;
4. Pembinaan Tertib Operasional Warnet, dengan indikator kinerja Terbinanya warnet di Kabupaten Balangan;
5. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, dengan indikator kinerja Jumlah rekomendasi izin menara telekomunikasi yang dikeluarkan;
6. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi, dengan indikator kinerja Jumlah Berdirinya menara telekomunikasi di wilayah Kecamatan;
7. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah;

BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT.

H. Program Pengembangan Layanan E-Government;

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Survey Bidang Komunikasi dan informatika, dengan indikator kinerja Tersedianya data UMKM di Kabupaten Balangan yang siap masuk e-commercer;
2. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, dengan indikator kinerja Jumlah dokumen MoU antara Pemkab dengan Operator Telekomunikasi;
3. Peningkatan Manajemen Aplikasi, dengan indikator kinerja Jumlah Tampilan Desain dan Kualitas Aplikasi;
4. Penyediaan Layanan Aplikasi E-Public Service, dengan indikator kinerja Jumlah Aplikasi E-Public Service;
5. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, dengan indikator kinerja Terselenggaranya Goverment Chief Information Officer;
6. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi, dengan indikator kinerja Tersusunnya Prosedur Tata Kelola E-Government;
7. Penyusunan regulasi di bidang komunikasi dan informatika, dengan indikator kinerja Terbentuknya Standarisasi dan Legalitas Tentang E-Government;
8. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi, dengan indikator kinerja Jumlah Aplikasi yang tersedia;

9. Penyediaan Layanan Aplikasi Layanan Pemerintahan, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Aplikasi Layanan Pemerintahan yang Tersedia;
10. Penyediaan Layanan Aplikasi E-Government, dengan indikator kinerja Jumlah Layanan Aplikasi Layanan E-Government yang Tersedia;

BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN SALURAN KOMUNIKASI PUBLIK

I. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi, dengan indikator kinerja Jumlah SDM Pemerintah Kabupaten Balangan yang kompeten dalam bidang aplikasi dan database;
2. Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA, dengan indikator kinerja Jumlah SDM Jurnalistik yang Terampil;

J. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa.

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kerjasama dengan Media Elektronik, dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan pembangunan kabupaten Balangan pada Radio dan Televisi Terdokumentasi;
2. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dengan indikator kinerja Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui website SKPD yang terselenggara;

3. Pagelaran Pertunjukan Rakyat, dengan indikator kinerja Jumlah Pagelaran Pertunjukan Rakyat;
4. Sosialisasi Media Luar Ruang, dengan indikator kinerja Jumlah Media yang mengikuti Sosialisasi dengan Media Luar Ruang;
5. Dialog interaktif dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan Dialog Interaktif Melalui Radio, dan Televisi;
6. Pembuatan Vidio Informasi, dengan indikator kinerja Tersedianya Video informasi;
7. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator kinerja Tersedianya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi yang sehat;
8. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat,dengan indikator kinerja Tersedianya informasi pembangunan daerah pada Pameran Pembangunan;
9. Pelayanan Aspirasi Publik, dengan indikator kinerja Tersedianya Informasi Tentang Aspirasi Publik;

BIDANG STATISTIK

K. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Data Survey Statistik; dengan indikator kinerja Tersedianya Sumber Data Survey Statistik;

2. Penyusunan dan pengumpulan data PDRB, dengan indikator kinerja Terbuatnya Buku Kajian Ekonomi Regional
3. Pembuatan Buletin/Artikel Informasi Statistik Sektoral, dengan indikator kinerja Tersusunnya Buletin Artikel Informasi Statistik;
4. Penyusunan Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah, dengan indikator kinerja Tersusunnya Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah;
5. Penyusunan Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan, dengan indikator kinerja Tersusunnya Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan
6. Penyusunan Buku Ekonomi Kabupaten Balangan, dengan indikator kinerja Tersusunnya Buku Ekonomi Kabupaten Balangan;
7. Lomba Cerdas Baca Statistik, dengan indikator kinerja Jumlah Lomba Cerdas Baca Statistik;
8. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, dengan indikator kinerja Terbuatnya Buku Analisa Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan dan Buku Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Balangan;
9. Pengolahan, updating dan analisis data PDRB; dengan indikator kinerja tersedianya data statistik sektoral Kabupaten Balangan tahunan
10. Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka dengan indikator kinerja Tersedianya Buku Kecamatan dalam Angka Tahunan
11. Penyusunan Buku Kabupaten dalam Angka dengan indikator kinerja Tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka tahunan;

BAB VI

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table di bawah ini :

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Peningkatan Penerapan E-Government	0%	5%	30%	55%	75%	90%	100%	100%
2	Tingkat Diseminasi dan Pendistribusian Informasi (%)	0%	0%	30%	55%	75%	90%	100%	100%
3	Persentase layanan item data statistik sektoral yang disajikan secara akurat	67%	67%	67%	83%	83%	83%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan dan capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renstra SKPD berfungsi sebagai acuan resmi bagi SKPD untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2016-2021. Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauhmana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Perencanaan Stategis (Renstra) dibuat dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Dinas Instansi Pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dan berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Oleh karena itu perlu dukungan dan peran aktif seluruh unsur pelaksana dan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaannya.

Paringin, 2017

**Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan**



Drs. H. Gunawan, M. Si

NIP. 19601223 198202 1 006



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN

Kode	Urusan, Program, dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Penanggung Jawab
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
0 RUTIN																		
0.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	1,680,500,000	100 %	2,540,502,000	100 %	2,847,877,000	100 %	3,107,952,000	100 %	3,333,493,000	100 %	3,599,275,000	100 %	3,599,275,000	
0.00.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya sarana dan prasarana surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	29,500,000	12 Bulan	70,000,000	12 Bulan	77,000,000	12 Bulan	84,700,000	12 Bulan	93,170,000	12 Bulan	102,487,000	12 Bulan	102,487,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Penerangan dan Listrik untuk Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	245,000,000	12 Bulan	199,800,000	12 Bulan	222,000,000	12 Bulan	233,100,000	12 Bulan	194,000,000	12 Bulan	203,700,000	12 Bulan	203,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah PNSD yang menerima honorarium sesuai dengan beban tugas	20 orang	20 orang	163,000,000	23 orang	210,000,000	25 orang	220,000,000	25 orang	231,525,000	25 orang	243,101,000	25 orang	255,000,000	25 orang	255,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah TKHL yang menjalankan tugas kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	38,500,000	12 Bulan	46,500,000	12 Bulan	51,150,000	12 Bulan	56,265,000	12 Bulan	61,891,000	12 Bulan	68,080,000	12 Bulan	68,080,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	35,500,000	1 Paket	37,000,000	1 Paket	40,700,000	1 Paket	44,770,000	1 Paket	49,247,000	1 Paket	54,171,000	1 Paket	54,171,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang diadakan	0 Buah	0 Buah		50 Buah	20,140,000	60 Buah	21,154,000	60 Buah	22,154,000	70 Buah	24,369,000	75 Buah	26,806,000	75 Buah	26,806,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Frekuensi perbaikan peralatan kerja	75 kali	75 kali	19,500,000	46 kali	31,140,000	80 kali	36,330,000	80 kali	38,146,000	85 kali	40,000,000	85 kali	44,000,000	85 kali	44,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang diadakan	2000 Buah	2000 Buah	54,750,000	3306 Buah	45,202,000	2500 Buah	49,722,000	2500 Buah	54,694,000	3000 Buah	60,163,000	3000 Buah	66,180,000	3000 Buah	66,180,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	80 Buah	80 Buah	25,750,000	30 Buah	55,400,000	90 Buah	119,000,000	95 Buah	140,000,000	95 Buah	154,000,000	95 Buah	169,000,000	95 Buah	169,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan	135 Buah	135 Buah	10,000,000	1020 Buah	88,620,000	1020 Buah	93,051,000	1020 Buah	93,051,000	1020 Buah	93,051,000	1020 Buah	93,051,000	1020 Buah	93,051,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan, minuman, snack rapat dan tamu	750 kotak	750 kotak	19,000,000	750 kotak	36,000,000	750 kotak	47,000,000	750 kotak	51,700,000	750 kotak	56,870,000	750 kotak	56,870,000	750 kotak	56,870,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	250 kali	250 kali	980,000,000	177 kali	1,400,700,000	192 kali	1,540,770,000	192 kali	1,694,847,000	192 kali	1,864,331,000	192 kali	2,020,700,000	192 kali	2,020,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.01.20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang dilaksanakan dalam satu tahun	200 kali	200 kali	60,000,000	201 kali	300,000,000	226 kali	330,000,000	226 kali	363,000,000	226 kali	399,300,000	226 kali	439,230,000	226 kali	439,230,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	cakupan sarana kerja aparatur	100 %	100 %	600,250,000	100 %	1,092,920,000	100 %	1,410,278,000	100 %	1,362,740,000	100 %	1,499,407,000	100 %	1,642,605,000	100 %	1,642,605,000	
0.00.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Garasi yang dibangun	0 Paket	0 Paket		0 Paket		1 Paket	181,250,000	1 Paket	199,000,000	1 Paket	219,000,000	1 Paket	241,000,000	1 Paket	241,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Meubeler yang diadakan	20 Buah	20 Buah	15,000,000	50 Buah	88,000,000	50 Buah	96,800,000	30 Buah	110,000,000	30 Buah	121,000,000	40 Buah	133,000,000	40 Buah	133,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.14	Pengadaan Komputer	Terpenuhinya Komputer	7 Buah	7 Buah	37,500,000	10 Buah	130,000,000	10 Buah	140,900,000	10 Buah	154,900,000	10 Buah	170,000,000	10 Buah	187,500,000	10 Buah	187,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.15	Pengadaan Alat-alat Studio	Jumlah Alat-alat studio yang diadakan	5 Buah	5 Buah	15,750,000	5 Buah	30,000,000	3 Buah	31,500,000	2 Buah	30,000,000	2 Buah	35,000,000	5 Buah	57,500,000	5 Buah	57,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.18	Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpn	Jumlah Instalasi Listrik dan Telpn yang diadakan	0 Instalasi	0 Instalasi		1 Instalasi	100,000,000	1 Instalasi	110,000,000	0 Instalasi		0 Instalasi		0 Instalasi		0 Instalasi		Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.19	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlengkapan Kantor yang diadakan	1 Buah	1 Buah		10 Buah	50,000,000	5 Buah	55,000,000	5 Buah	60,500,000	10 Buah	66,500,000	10 Buah	73,205,000	10 Buah	73,205,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	1 Paket	1 Paket	62,000,000	1 Paket	118,000,000	1 Paket	131,000,000	1 Paket	145,000,000	1 Paket	158,000,000	1 Paket	173,900,000	1 Paket	173,900,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	17 Buah	17 Buah	190,000,000	17 Buah	226,000,000	10 Buah	251,270,000	10 Buah	288,900,000	22 Buah	332,000,000	22 Buah	338,700,000	22 Buah	338,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang memerlukan pemeliharaan	0 Paket	0 Paket		1 Paket	60,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	66,000,000	1 Paket	72,600,000	1 Paket	79,800,000	1 Paket	79,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan	20 unit	20 unit	280,000,000	20 unit	280,000,000	20 unit	340,000,000	20 unit	294,000,000	20 unit	308,700,000	20 unit	339,000,000	20 unit	339,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.02.7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Buah	0 Buah		10 Buah	10,920,000	10 Buah	12,558,000	10 Buah	14,440,000	10 Buah	16,607,000	10 Buah	19,000,000	10 Buah	19,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

0.00.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	100 %	100 %	24,000,000	100 %	60,950,000	100 %	67,000,000	100 %	99,500,000	100 %	101,000,000	100 %	101,000,000	100 %	101,000,000	
0.00.03.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	52 stel	52 stel	24,000,000	46 stel	25,950,000	0 stel		55 stel	32,500,000	0 stel	34,000,000	55 stel	34,000,000	55 stel	34,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.03.4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI yang diadakan	0 stell	0 stell		0 stell		52 stell	32,000,000	52 stell	32,000,000	52 stell	32,000,000	52 stell	32,000,000	52 stell	32,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.03.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	0 stell	0 stell		46 stell	35,000,000	55 stell	35,000,000	55 stell	35,000,000	55 stell	35,000,000	55 stell	35,000,000	55 stell	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	133,000,000	100 %	427,400,000	100 %	546,850,000	100 %	585,000,000	100 %	643,500,000	100 %	706,800,000	100 %	706,800,000	
0.00.05.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	0 orang	0 orang		10 orang	90,200,000	10 orang	181,000,000	10 orang	199,100,000	10 orang	219,000,000	10 orang	240,000,000	10 orang	240,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.05.2	Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0 orang	0 orang		10 orang	107,500,000	10 orang	118,250,000	10 orang	130,000,000	10 orang	143,000,000	10 orang	157,300,000	10 orang	157,300,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.05.3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12 Bulan	125,000,000	20 orang	200,000,000	12 Bulan	215,000,000	20 orang	220,000,000	20 orang	242,000,000	20 orang	266,000,000	20 orang	266,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.05.5	Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek dan Ujian Sertifikasi Keahlian Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa	2 orang	2 orang	8,000,000	5 orang	29,700,000	5 orang	32,600,000	5 orang	35,900,000	5 orang	39,500,000	5 orang	43,500,000	5 orang	43,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %	100 %	37,605,000	100 %	162,000,000	100 %	178,200,000	100 %	195,720,000	100 %	215,282,000	100 %	237,250,200	100 %	237,250,200	
0.00.06.1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	35,000,000	12 Dokumen	38,500,000	12 Dokumen	42,350,000	12 Dokumen	46,585,000	12 Dokumen	51,243,500	12 Dokumen	51,243,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06.2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	16,500,000	12 Dokumen	18,000,000	12 Dokumen	19,800,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	22,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06.4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	16,500,000	12 Dokumen	18,000,000	12 Dokumen	19,800,000	12 Dokumen	22,000,000	12 Dokumen	22,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06.5	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	10,000,000	12 Dokumen	11,000,000	12 Dokumen	12,100,000	12 Dokumen	13,300,000	12 Dokumen	14,630,000	12 Dokumen	14,630,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06.6	Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Jumlah Laporan keg. Monitoring, Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	12 Dokumen	12 Dokumen	37,605,000	12 Dokumen	42,000,000	12 Dokumen	46,200,000	12 Dokumen	50,820,000	12 Dokumen	55,902,000	12 Dokumen	61,492,200	12 Dokumen	61,492,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
0.00.06.8	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SOPD	0 Dokumen	0 Dokumen		12 Dokumen	45,000,000	12 Dokumen	49,500,000	12 Dokumen	54,450,000	12 Dokumen	59,895,000	12 Dokumen	65,884,500	12 Dokumen	65,884,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																	
2.10.15	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	Penyebarluasan Cakupan Komunikasi dan Informasi	1,28% %	2,56% %	935,000,000	4,48% %	2,925,480,000	6,41% %	3,907,859,000	8,33% %	4,014,887,000	10,25% %	4,224,075,000	10,25% %	4,103,055,000	10,25% %	4,103,055,000	
2.10.15.09	Sosialisasi Regulasi dan Standarisasi Komunikasi dan Informasi	Tersebarluasnya Informasi Regulasi	0 Persen	0 Persen		0 Persen		100 Persen	200,000,000	100 Persen	220,000,000	100 Persen	242,000,000	100 Persen	266,200,000	100 Persen	266,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.1	Pengawasan Dan Monitoring Pemancar Dan Frekuensi Radio	Pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Balangan dan penerimaan PAD dari retribusi menara	1 Dokumen	1 Dokumen	420,000,000	1 Dokumen	159,780,000	1 Dokumen	167,769,000	1 Dokumen	176,157,000	1 Dokumen	184,965,000	1 Dokumen	203,000,000	1 Dokumen	203,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.10	Pengadaan Manajemen Bandwidth	Tersedianya Jaringan koneksi internet ke Kecamatan	0 kecamatan	0 kecamatan		2 kecamatan	524,000,000	4 kecamatan	400,000,000	4 kecamatan	440,000,000	4 kecamatan	480,000,000	4 kecamatan	530,000,000	4 kecamatan	530,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.13	Pembinaan Tertib Operasional Warnet	Terbinanya warnet di Kabupaten Balangan	3 Warnet	3 Warnet	22,000,000	5 Warnet	90,000,000	5 Warnet	100,000,000	5 Warnet	120,000,000	8 Warnet	120,000,000	8 Warnet	150,000,000	8 Warnet	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.14	Penyusunan regulasi di bidang komunikasi dan informatika	Terbentuknya Perda e-gov danTerbentuknya regulasi turunan Perda e-gov	0 %	0 %		0 %		50 %	50,000,000	100 %	100,000,000	0 %		0 %		0 %		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.15	Monitoring dan evaluasi	Monitoring dan evaluasi bidang informatika	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,300,000	1 Dokumen	39,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.16	Operasional Media Center	Terlaksananya Kegiatan Operasional Media Center	0 %	0 %		100 %	100,000,000	100 %	250,000,000	100 %	275,000,000	100 %	302,500,000	100 %	332,750,000	100 %	332,750,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.17	Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	Terlaksananya Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	219,615,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.18	Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan	Terlaksananya Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan	0 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	300,000,000	2 Dokumen	330,000,000	2 Dokumen	363,000,000	2 Dokumen	399,300,000	2 Dokumen	399,300,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.19	Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPIP)	Terlaksananya Kegiatan Operasional PPID /Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemkab Balangan	0 kali	0 kali		10 kali	160,000,000	10 kali	176,000,000	10 kali	193,600,000	10 kali	212,960,000	10 kali	234,256,000	10 kali	234,256,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah rekomendasi izin menara telekomunikasi yang dikeluarkan	1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	8 Dokumen	118,400,000	8 Dokumen	124,320,000	8 Dokumen	130,530,000	8 Dokumen	137,000,000	8 Dokumen	150,700,000	8 Dokumen	150,700,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Berdirinya menara telekomunikasi di wilayah Kecamatan	0 Desa	0 Desa	6+	2 Desa	195,000,000	2 Desa	214,500,000	2 Desa	235,900,000	2 Desa	259,500,000	2 Desa	285,400,000	2 Desa	285,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.3	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	Terbangunnya infrastruktur perangkat keras teknologi informasi	1 Paket	1 Paket	224,000,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket	500,000,000	1 Paket		1 Paket		Dinas Komunikasi dan Informatika

2.10.15.4	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	tersedianya dokumen MoU antara Pemkab dengan Operator Telekomunikasi	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.10.15.7	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Tersedianya aplikasi	0 %	0 %		100 %	410,000,000	100 %	451,000,000	100 %	496,100,000	100 %	545,700,000	100 %	600,284,000	100 %	600,284,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.7	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Terselenggaranya Government Chief Information Officer	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	48,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	266,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.15.8	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersusunnya Prosedur Tata Kelola E-Government	0 Dokumen	0 Dokumen		3 Dokumen	140,300,000	3 Dokumen	126,270,000	3 Dokumen	84,800,000	3 Dokumen	93,300,000	3 Dokumen	102,600,000	3 Dokumen	102,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.16	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Terlaksananya Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen Dokumen	135,000,000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		
2.10.16.16.02	Survey Bidang Komunikasi dan informatika	Tersedianya data UMKM di Kabupaten Balangan yang siap masuk e-commercer	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen	135,000,000	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen		Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.17	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Meningkatnya kemampuan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	0 orang	0 orang		50 orang	325,000,000	80 orang orang	365,000,000	300 orang orang	401,500,000	90 orang orang	441,600,000	90 orang orang	485,800,000	90 orang orang	485,800,000	
2.10.17.1	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya SDM Pemerintah Kabupaten Balangan yang kompeten dalam bidang aplikasi dan database	0 orang	0 orang		20 orang	175,000,000	20 orang	200,000,000	20 orang	220,000,000	20 orang	242,000,000	20 orang	266,200,000	20 orang	266,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.17.2	Pelatihan Jurnalistik bagi siswa SLTP/SLTA	Tersedianya SDM Jurnalistik yang Terampil	0 orang	0 orang		20 orang	150,000,000	20 orang	165,000,000	20 orang	181,500,000	20 orang	199,600,000	20 orang	219,600,000	20 orang	219,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18	PROGRAM KERJASAMA INFORMSI DAN MEDIA MASSA	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Informasi Pembangunan Melalui Media Cetak dan Elektronik	100 %	100 %	81,400,000	100 %	5,212,800,000	100 %	8,552,990,000	100 %	7,177,068,000	100 %	7,875,574,000	100 %	8,550,800,000	100 %	8,550,800,000	
2.10.18.08	Kerjasama dengan media Online	Terdokumentasikannya kegiatan pembangunan kabupaten Balangan pada Berita Online di Website	0 Media Online	0 Media Online		2 Media Online	100,000,000	2 Media Online	110,000,000	2 Media Online	150,000,000	2 Media Online	200,000,000	2 Media Online	250,000,000	2 Media Online	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.09	Kerjasama dengan Media Elektronik	Terdokumentasikannya kegiatan pembangunan kabupaten Balangan pada Radio dan Televisi	0 Media	0 Media		5 Media	100,000,000	5 Media	200,000,000	5 Media	220,000,000	5 Media	242,000,000	5 Media	266,200,000	5 Media	266,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Terselenggaranya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui website SKPD	0 SKPD	0 SKPD		20 SKPD	70,000,000	20 SKPD	265,410,000	20 SKPD	290,000,000	20 SKPD	300,000,000	20 SKPD	320,000,000	20 SKPD	320,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.10	Pagelaran Pertunjukan Rakyat	Terlaksananya Pagelaran Pertunjukan Rakyat	0 kali	0 kali		12 kali	267,000,000	12 kali	293,700,000	12 kali	323,000,000	12 kali	355,000,000	12 kali	390,000,000	12 kali	390,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.11	Sosialisasi Media Luar Ruang	Jumlah Media yang mengikuti Sosialisasi dengan Media Luar Ruang	0 Media	0 Media		5 Media	1,900,000,000	5 Media	2,000,000,000	5 Media	2,100,000,000	5 Media	2,205,000,000	5 Media	2,315,000,000	5 Media	2,315,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.12	Dialog interaktif	Terlaksananya kegiatan Dialog Interaktif Melalui Radio, dan Televisi	0 kali	0 kali		12 kali	100,000,000	12 kali	120,000,000	12 kali	150,000,000	12 kali	200,000,000	12 kali	210,000,000	12 kali	210,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.15	Pembuatan Vidio Informasi	Tersedianya Video informasi	0 bh	0 bh		0 bh		5 bh	2,000,000,000	5 bh	220,000,000	5 bh	242,000,000	5 bh	266,000,000	5 bh	266,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tersedianya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi yang sehat	0 Artikel	0 Artikel		350 Artikel	210,800,000	350 Artikel	231,880,000	350 Artikel	255,068,000	350 Artikel	280,574,000	350 Artikel	308,600,000	350 Artikel	308,600,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Tersedianya informasi pembangunan daerah pada Pameran Pembangunan	0 Persen	0 Persen		100 Persen	165,000,000	10 Persen	750,000,000	100 Persen	600,000,000	100 Persen	660,000,000	100 Persen	726,000,000	100 Persen	726,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.5	Jumpa Pers	Terlaksananya Kegiatan Jumpa Pers	0 Bulan	0 Bulan		12 Bulan	100,000,000	12 Bulan	110,000,000	12 Bulan	150,000,000	12 Bulan	200,000,000	12 Bulan	210,000,000	12 Bulan	210,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.6	Kerjasama dengan Media Cetak	Terdokumentasikannya kegiatan pembangunan kabupaten Balangan	0 Media	0 Media		17 Media	2,200,000,000	17 Media	2,300,000,000	17 Media	2,530,000,000	17 Media	2,783,000,000	17 Media	3,061,000,000	17 Media	3,061,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.18.7	Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat	Terbinanya Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Balangan	100 Persen	100 Persen	81,400,000	0 Persen		100 Persen	172,000,000	100 Persen	189,000,000	100 Persen	208,000,000	100 Persen	228,000,000	100 Persen	228,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.10.19	PENGLOLAAN ASPIRASI PUBLIK	Tersedianya Informasi Tentang Aspirasi Publik	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	110,000,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	130,000,000	4 Dokumen	130,000,000	
2.10.19.01	Pelayanan Aspirasi Publik	Tersedianya Informasi Tentang Aspirasi Publik	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen	100,000,000	4 Dokumen	110,000,000	4 Dokumen	120,000,000	4 Dokumen	130,000,000	4 Dokumen	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14	STATISTIK																	
2.14.15	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH	Cakupan ketersediaan data/informasi/statistik daerah	0 Buah Data %	0 Buah Data %		13 Buah Data %	327,300,000	13 Buah Data %	776,165,000	13 Buah Data %	858,772,000	15 Buah Data %	916,128,000	15 Buah Data %	1,012,000,000	15 Buah Data %	1,012,000,000	
2.14.15.01.15.07	Pengelolaan Data Survey Statistik	Tersedianya Sumber Data Survey Statistik	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	55,100,000	1 Dokumen	57,855,000	1 Dokumen	60,747,000	1 Dokumen	63,834,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.03	Penyusunan dan pengumpulan data PDRB	Terbuatnya Buku Kajian Ekonomi Regional	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	66,000,000	1 Dokumen	72,600,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.08	Pembuatan Buletin/Artikel Informasi Statistik Sektoral	Tersusunnya Buletin Artikel Informasi Statistik Sektoral	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	66,000,000	6 Dokumen	72,000,000	6 Dokumen	80,000,000	6 Dokumen	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.09	Pembuatan Aplikasi Basis Data Elektronik Statistik Daerah	Terbuatnya Aplikasi Basis Data Elektronik Statistik Daerah	0 Aplikasi	0 Aplikasi		0 Aplikasi		1 Aplikasi	50,000,000	1 Aplikasi	66,000,000	1 Aplikasi	72,000,000	1 Aplikasi	79,000,000	1 Aplikasi	79,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.10	Penyusunan Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah	Tersusunnya Buku Infrastruktur Pembangunan Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	66,000,000	1 Dokumen	72,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.11	Penyusunan Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan	Tersusunnya Buku Indikator Sosial Budaya Kabupaten Balangan	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

2.14.15.12	Penyusunan Buku Ekonomi Kabupaten Balangan	Tersusunnya Buku Ekonomi Kabupaten Balangan	0 Dokumen	0 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,000,000	1 Dokumen	74,000,000	1 Dokumen	74,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.13	Lomba Cerdas Baca Statistik	Terlaksananya Lomba Cerdas Baca Statistik	0 Kali	0 Kali		0 Kali		1 Kali	100,000,000	1 Kali	110,000,000	1 Kali	120,000,000	1 Kali	130,000,000	1 Kali	130,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.2	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Terbuatnya Buku Analisa Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan Tahun 2016 dan Buku Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Balangan Tahun 2016	0 Dokumen	0 Dokumen		2 Dokumen	109,300,000	2 Dokumen	114,700,000	2 Dokumen	126,241,000	2 Dokumen	126,241,000	2 Dokumen	138,800,000	2 Dokumen	138,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.4	Pengolahan, updating dan analisis data PDRB	tersedianya data statistik sektoral Kabupaten Balangan tahunan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	52,700,000	1 Dokumen	57,900,000	1 Dokumen	60,790,000	1 Dokumen	63,834,000	1 Dokumen	70,200,000	1 Dokumen	70,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.5	Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Tersedianya Buku Kecamatan dalam Angka Tahunan	0 Dokumen	0 Dokumen		8 Dokumen	55,100,000	8 Dokumen	57,855,000	8 Dokumen	60,747,000	8 Dokumen	63,785,000	8 Dokumen	70,000,000	8 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.14.15.6	Penyusunan Buku Kabupaten dalam Angka	Tersedianya Buku Kabupaten dalam Angka tahunan	0 Dokumen	0 Dokumen		1 Dokumen	55,100,000	1 Dokumen	57,855,000	1 Dokumen	60,747,000	1 Dokumen	63,834,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Balangan, 2017
PIMPINAN



Drs H. GUNAWAN
NIP.19601223198202 1 006

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BALANGAN

